

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menganut asas desentralisasi yang memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan melalui Otonomi Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan asas-asas pelayanan publik yang didalamnya meliputi: transparansi, akuntabilitas, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak, dan kewajiban.

Setiap satuan kerja baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya perlu adanya perencanaan, baik perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu pemerintah merumuskan berbagai kebijakan-kebijakan dalam bentuk anggaran. Di dalam anggaran akan dapat dilihat seberapa besar fungsi pemerintah dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya.

Pada sektor publik, anggaran harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran pada sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana dan untuk tiap-tiap program dan

aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik rakyat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas dan transparan terhadap seluruh elemen masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk penetapan anggaran.

Dalam penyusunan anggaran, kepala daerah di bantu oleh tim penyusun anggaran pemerintah daerah dalam menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUAPBD). Rancangan KUAPBD memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan, disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Hasil rancangan KUAPBD disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.

Proses penganggaran menggunakan pendekatan kinerja diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan tentang pedoman dalam pembentukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), pembentukan RAPBD dilaksanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama-sama unit organisasi perangkat daerah (unit kerja). Selain yang tercantum dalam permendagri Nomor 59 Tahun 2007, dijelaskan juga menurut (Prof. Dr. Abdul Halim, 2007) pada pasal 64 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah, pada era orde baru, APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemda, dimana pada satu pihak menggambarkan

perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu.

Rancangan anggaran unit kerja tercantum pada suatu dokumen Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), yang di dalamnya berisi tentang standar analisis belanja, tolak ukur kinerja dan standar biaya sebagai instrumen pokok dalam anggaran kinerja. Sedangkan pedoman evaluasi kinerja pemerintah daerah diatur dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pedoman Evaluasi Daerah Otonomi Hasil Pemekaran Setelah Berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Partisipasi penyusunan anggaran adalah proses menggambarkan individu-individu terlibat dalam penyusunan anggaran dan mempunyai pengaruh terhadap target anggaran dan perlunya penghargaan atas pencapaian target anggaran tersebut (Brownell, 1982 dalam Falikhatun 2007). Partisipasi penyusunan anggaran merupakan pendekatan yang secara umum dapat meningkatkan kinerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektifitas organisasi.

Keberhasilan dalam mengelola suatu organisasi tidak lepas dari beberapa faktor sikap pemimpin dan sikap bawahan dalam melaksanakan tugas guna mencapai sebuah tujuan. Dalam hal ini yang menjadi pemimpin adalah para Kepala SKPD/Instansi, Kepala Bagian dalam suatu SKPD/Instansi. Seorang pemimpin yang bijaksana dapat memperlihatkan jiwa kepemimpinan (*leadership*) yang dapat berinteraksi dan peka terhadap situasi yang sedang dihadapi dan dapat dengan cermat memecahkan situasi yang sedang dihadapi

dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain dapat memecahkan suatu masalah yang sedang dihadapi, seorang pemimpin juga bisa dengan cermat merencanakan, menyusun suatu anggaran kegiatan baik jangka panjang maupun jangka pendek dengan dibantu oleh bawahan yang mempunyai tupoksinya.

Gaya kepemimpinan itu sendiri adalah suatu cara yang dilakukan dalam proses memimpin yang dapat di implementasikan dengan melalui perilaku kepemimpinan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bertindak dengan apa yang diinginkan. Namun tidak mudah dalam mempengaruhi seseorang untuk bisa mengikuti apa yang diinginkan seorang pemimpin. Perlu adanya pendekatan-pendekatan agar dapat mengetahui seluk beluk/sifat orang tersebut. Gaya kepemimpinan juga dapat mempengaruhi kinerja bawahannya dan bagaimana agar termotivasi untuk bekerja dan berusaha lebih keras karena menyukai dan menghargai pemimpin tersebut, mereka memiliki kepuasan yang lebih tinggi. Orang-orang yang bekerja untuk gaya kepemimpinan tertentu, termotivasi untuk bekerja dan berusaha lebih keras karena menyukai dan menghargai pemimpin tersebut, mereka memiliki kepuasan yang lebih tinggi (Solikuh Arifin, 2012).

Penelitian yang membahas hubungan antara partisipasi dalam proses penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah masih sering diperdebatkan. Hasil penelitian Brownel (1982) melakukan studi lapangan terhadap 48 manajer pusat biaya level menengah yang bekerja pada perusahaan manufaktur di San Fransisco Amerika Serikat. Hasil dari penelitian tersebut

adalah menemukan hubungan positif dan signifikan antara partisipasi penganggaran dan kinerja manajerial.

Sardjito dan Muthaher (2007), melakukan penelitian mengenai pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Trisnaningsih (2007) melakukan penelitian tentang pengaruh gaya kepemimpinan, terhadap kinerja auditor. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Mediaty (2010) yang meneliti tentang pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil dari penelitian Mediaty (2010) di peroleh partisipasi penyusunan anggaran dan gaya kepemimpinan teruji secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Secara parsial masing-masing variabel yaitu variabel partisipasi penyusunan anggaran dan variabel gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.

Peneliti terdahulu Mediaty (2010) yang menjadi sampel adalah Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, sedang penelitian ini menggunakan sampel Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti akan menguji kembali secara simultan pengaruh variabel partisipasi penyusunan anggaran dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja

aparatur pemerintah daerah dan mengambil judul : **“Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Untuk menguji apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur Pemerintah Daerah?
2. Untuk menguji apakah Gaya Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur Pemerintah Daerah?

C. Pembatasan Masalah

Untuk membatasi cakupan penelitian ini, batasan masalah dalam penelitian ini hanya di batasi pada pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja aparatur Pemerintah Daerah.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur Pemerintah Daerah.
2. Untuk menguji Gaya Kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur Pemerintah Daerah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penyusunan anggaran yang dapat meningkatkan kinerja aparat Pemerintah Daerah didalam instansi-instansi yang berada dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

2. Bagi Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya penelitian mengenai pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja aparatur Pemerintah Daerah.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperluas pengetahuan serta wawasan mengenai pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja aparatur Pemerintah Daerah.